

**PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME,
KOMPETENSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KINERJA AUDITOR**

SKRIPSI



**Oleh :
Cici Widayanti
140810351**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME,
KOMPETENSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KINERJA AUDITOR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Cici Widayanti
140810351**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Cici Widayanti

NPM : 140810351

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompetensi Dan Penerapan
Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 3 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Cici Widayanti

140810351

**PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME,
KOMPETENSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KINERJA AUDITOR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :
Cici Widayanti
140810351**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 3 Agustus 2018

**Handra Tipa, S.PdI., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi terhadap kinerja auditor. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh dengan 35 responden, namun data responden yang dapat diolah adalah 33 kuesioner. Data yang diolah adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Data kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan data, setelah itu dilakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan *software* SPSS Versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independensi, profesionalisme, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor sedangkan variabel penerapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Variabel independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,894 yang artinya variabel independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi mempengaruhi kinerja auditor sebesar 89,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Kata kunci: Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Penerapan Teknologi Informasi, Kinerja Auditor

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of independence, professionalism, competence and application of information technology on auditor performance. The population in this study is the auditor at BPK RI Representative in Kepulauan Riau Province. The sampling technique in this study uses a sampling technique saturated with 35 respondents, but the data of respondents that can be processed are 33 questionnaires. Data processed is primary data through questionnaires. The data was then analyzed to describe the data, after that the data quality test, classical assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis testing using SPSS Version 21 software. The results of this study showed that partially the independence, professionalism and competency variables had a significant effect on performance auditors while the variable application of information technology does not have a significant effect on performance. Independent variables, professionalism, competence and application of information technology simultaneously affect the auditor's performance. With a coefficient of determination of 0,894 which means that the independence, professionalism, competency and application of information technology variables affect auditor performance by 89,4% and the rest is influenced by other factors not included in this study.

Keywords: *Independence, Professionalism, Competence, Application of Information Technology, Performance Auditor*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompetensi dan Penerapan Teknologi Informasi” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam.
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI., M.Ak. selaku Pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Akuntansi, Universitas Putera Batam.

6. Bapak Sunarto Wage, S.E., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Dosen pengajar Program Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
8. Bapak Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA. selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau.
9. Seluruh Staff BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
10. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Yatino dan Ibu Wan Mariah atas arahan, kasih sayang, dukungan moril dan finansial serta motivasi kepada penulis selama ini.
11. Teman-teman sejawat yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, 3 Agustus 2018

Cici Widayanti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Kerangka Teoritis.....	13
2.1.1. Definisi Audit.....	13
2.1.2. Kinerja.....	15
2.1.2.1. Pengukuran Kinerja.....	16
2.1.2.2. Tujuan Penilaian Kinerja.....	17
2.1.3. Independensi.....	18
2.1.4. Profesionalisme.....	22
2.1.5. Kompetensi.....	24

2.1.6. Penerapan Teknologi Informasi	25
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Pemikiran	30
2.4. Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Desain Penelitian.....	33
3.2. Operasional Variabel	34
3.2.1. Variabel Independen	35
3.2.2. Variabel Dependen.....	35
3.3. Populasi dan Sampel.....	37
3.3.1. Populasi	37
3.3.2. Sampel.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Metode Analisis Data	40
3.5.1. Analisis Deskriptif	40
3.5.2. Uji Kualitas Data.....	40
3.5.2.1. Uji Validitas.....	41
3.5.2.2. Uji Reliabilitas	42
3.5.3. Uji AsumsiKlasik	44
3.5.3.1. Uji Normalitas.....	44
3.5.3.2. Uji Multikolinearitas.....	45
3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas	45
3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda	46
3.5.5. Uji Hipotesis.....	47
3.5.5.1. Uji t	47
3.5.5.2. Uji F	48
3.5.5.3. Uji Determinasi.....	48
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	49
3.6.1. Lokasi Penelitian.....	49
3.6.2. Jadwal Penelitian.....	49

BAB IV PEMBAHASAN	51
4.1. Analisis Deskriptif.....	51
4.1.1. Gambaran Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	52
4.1.1.1. Sejarah Kantor Perwakilan	52
4.1.1.2. Visi dan Misi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.....	54
4.1.1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Bpk Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	54
4.1.1.4. Struktur Organisasi BPK Perwakilan	57
4.1.2. Profil Responden.....	60
4.1.2.1. Profil Responden Berdasarkan Usia	60
4.1.2.2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
4.1.2.3. Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	62
4.1.2.4. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja	62
4.1.3. Deskriptif Variabel.....	63
4.1.3.1. Deskriptif Variabel Independensi	63
4.1.3.2. Deskriptif Variabel Profesionalisme.....	64
4.1.3.3. Deskriptif Variabel Kompetensi	64
4.1.3.4. Deskriptif Variabel Penerapan Teknologi Informasi	64
4.1.3.5. Deskriptif Variabel Kinerja Auditor.....	65
4.2. Hasil Uji Kualitas Data.....	65
4.2.1. Hasil Uji Validitas.....	65
4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas	68
4.3. Hasil Asumsi Klasik	69
4.3.1. Hasil Uji Normalitas	69
4.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
4.3.3. Hasil uji Heterokedastisitas.....	73
4.4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
4.5. Hasil Uji Hipotesis	76
4.5.1. Hasil Uji t	76
4.5.2. Hasil Uji F	78
4.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	79
4.6. Pembahasan	80
4.6.1. Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor	80

4.6.2. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor	81
4.6.3. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor	81
4.6.4. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor	82
4.6.5. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	60
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas – Histogram.....	69
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas – Normal P-P Plot Regression Standardized ...	70
Gambar 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	36
Tabel 3.2 Lanjutan	37
Tabel 3.3 Skala <i>Likert</i>	39
Tabel 3.4 Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi	42
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian	50
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner	51
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia	60
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	62
Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja	62
Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Independensi	63
Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Profesionalisme	64
Tabel 4.8 Deskriptif Variabel Kompetensi	64
Tabel 4.9 Deskriptif Variabel Penerapan Teknologi Informasi	65
Tabel 4.10 Deskriptif Variabel Kinerja Auditor	65
Tabel 4.11 Uji Validitas Instrumen Variabel X1	66
Tabel 4.12 Uji Validitas Instrumen Variabel X2	66
Tabel 4.13 Uji Validitas Instrumen Variabel X3	67
Tabel 4.14 Uji Validitas Instrumen Variabel X4	67
Tabel 4.15 Uji Validitas Instrumen Variabel Y	68
Tabel 4.16 Uji Reliabilitas Instrumen Variabel X1, X2, X3, X4, Y	68
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas – <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	71
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.19 Analisis Regresi Linier Berganda	74
Tabel 4.20 Hasil Uji t	77
Tabel 4.21 Hasil Uji F	78
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	79

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Korelasi <i>Product Moment</i>	41
Rumus 3.2 <i>Alfa Cronbach</i>	43
Rumus 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
Rumus 3.4 Uji Ts	47
Rumus 3.5 Uji F	48
Rumus 3.6 Koefisien Determinasi	49

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Penelitian Terdahulu
- LAMPIRAN II Format Kuesioner
- LAMPIRAN III Tabulasi Data Responden dan Kuesioner
- LAMPIRAN IV Hasil Olah Data SPSS dan Tabel Statistik (r, t, F)
- LAMPIRAN V Daftar Riwayat Hidup
- LAMPIRAN VI Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan kinerja auditor akan tercapai apabila auditor dapat memenuhi syarat dasar untuk menjadi auditor dimana auditor harus memiliki sikap independensi, kecakapan profesionalisme, kompetensi dan memahami penerapan teknologi informasi dalam melaksanakan pengauditan agar suatu laporan keuangan yang telah diperiksa dapat dipercaya. Kepercayaan ini akan berkurang jika seorang auditor tidak bersikap independensi dan profesionalisme dalam fakta. Selain sikap independensi dan profesionalisme auditor juga harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan serta memahami penerapan teknologi informasi. Oleh karena itu, auditor harus dapat mempertahankan sikap independensi, memiliki kecakapan profesionalisme, kompetensi yang memadai serta memahami penerapan teknologi informasi untuk menunjang keberhasilan kinerjanya tak terkecuali auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh BPK. BPK merupakan badan yang tidak berada dibawah pemerintah sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BPK RI, 2017).

BPK memiliki peran aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Peran aktif tersebut dituangkan dalam rencana

strategis yang salah satunya adalah untuk mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional dalam semua aspek tugasnya untuk menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (i)Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkatkejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah; (ii)Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah; dan (iii)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan

pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*) (BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 2018).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etik.

Dalam meningkatkan kinerjanya, auditor dihadapkan pada berbagai tantangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Disampaikan oleh Mendagri bahwa tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus (Zulfikar, 2017/*tribunnews.com*). Masih rendahnya kinerja auditor terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan auditor. Banyaknya kasus korupsi, membuat masyarakat menuntut BPK meningkatkan kinerjanya untuk dapat menindaklanjuti penyimpangan terhadap anggaran negara. Kasus-kasus yang banyak terjadi dan melibatkan auditor BPK tidak hanya berdampak terhadap BPK RI yang tersandung kasus tersebut saja namun juga akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kinerja auditor yang berada di BPK RI perwakilan wilayah lain termasuk BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Namun saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPK sehingga membuat kinerja BPK kurang begitu optimal. Salah satu masalah yang dihadapi auditor BPK adalah transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah. Seringkali ketika pemeriksaan dilakukan, tiba-tiba muncul hasil wajar tanpa pengecualian tapi

kemudian muncul masalah sehingga auditor BPK harus bekerja lebih jujur, transparan dan menjauhi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Telah banyak kasus yang terjadi dan melibatkan auditor BPK sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja auditor BPK. Seperti yang terjadi pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap auditor utama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Irjen Kementerian Desa. OTT KPK itu terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam OTT tersebut, petugas menemukan uang Rp 1,145 miliar serta 3.000 dolar AS di dalam brangkas, namun KPK belum mengetahui sumber uang tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan Rp 40 juta yang diduga diberi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa kepada Auditor BPK. Ketua KPK mengatakan, uang Rp 40 juta tersebut merupakan bagian dari komitmen fee Rp 240 juta. Menurutnya, pada awal Mei 2017, terjadi penyerahan uang Rp 200 juta (Sonbay, 2017/kupang.tribunnes.com).

Kasus OTT KPK terhadap auditor BPK menggambarkan sejauh mana independensi auditor terhadap pemberian predikat WTP suatu lembaga/instansi. Kasus ini menyingkap opini WTP saat ini bisa dibeli dengan sejumlah uang. Independensi auditor menjadi hal yang kian langka.

Banyak lagi fenomena seputar independensi auditor BPK. Kasus suap terhadap auditor BPK RI Jawa Barat oleh pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan kasus suap BPK RI Sulawesi Utara oleh walikota Tomohon merupakan tindakan yang tidak etis sehingga membuat auditor BPK diragukan independensinya.

Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa sikap independensi auditor masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga akan berdampak pada kinerja auditor tersebut.

Selain bertanggungjawab mempertahankan independensinya, auditor juga dituntut agar bisa bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang profesional akan menghasilkan hasil pemeriksaan yang lebih baik dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerjanya. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 mengatakan bahwa profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Salah satu kasus di media berita online (Tempo.co, 2010/nasional.tempo.co) yang berhubungan dengan profesionalisme seorang auditor yaitu fenomena yang terjadi pada kasus auditor BPK yang menjadi penanggung jawab audit Bank Century. Indonesia Audit *Watch* melaporkan Ketua Tim Auditor Bank Century dan penanggung jawab audit Bank Century, ke Badan *Reserse* dan Kriminal, Mabes Polri. Indonesia Audit *Watch* menuding keduanya menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Indonesia Audit *Watch* menduga BPK telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK. Ketua tim auditor Bank Century dan penanggung jawab audit Bank Century maupun BPK sebagai lembaga dinilai telah memberikan keterangan palsu dan melampaui wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengaudit Bank Century. Indonesia Audit *Watch* menyatakan ada setidaknya enam dari sembilan temuan audit investigasi BPK yang terkait kasus

Bank Century itu diduga tidak valid. Audit *Watch* menyimpulkan ada pola yang tidak sinkron antara pengaudit dan yang diaudit. Melihat fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor BPK juga masih lemah, karena auditor telah melanggar komitmen profesidan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keterangan palsu sehingga akan berpengaruh nantinya terhadap kinerja auditor.

Pernyataan Standar Umum Pertama SPKN adalah: Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Pengertian kompetensi menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu. Maka disimpulkan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi. Seorang auditor harus menjadi orang yang memahami bidang akuntansi dan auditing, dan ditambah dengan pengalaman yang cukup, yang akan meningkatkan kinerja seorang auditor.

Dikutip dari (*Sindonews.com*, 2011) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus dana talangan Bank Century berakhir dengan mengecewakan. Tidak ada perkembangan baru dalam laporan yang telah ditunggu selama berbulan-bulan itu. Hasil audit forensik BPK dinilai banyak pihak sebagai sebuah kegagalan. Namun kegagalan tersebut dianggap suatu hal yang wajar. Pasalnya, BPK mempekerjakan auditor yang tidak berkompeten dibidangnya. Kompetensi auditor BPK inilah yang terus dipertanyakan. Menurut politikus Partai Keadilan

Sejahtera, BPK diduga sengaja tak memilih auditor yang memiliki sertifikat khusus seorang auditor forensik, yakni *Certified Fraud Examiner* (CFE). Sertifikat ini merupakan dasar kompetensi auditor yang memiliki kemampuan untuk menelusuri indikasi korupsi. Berdasarkan penelusuran di situs www.acfe.com yang dimiliki *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) ketiga nama penanggung jawab audit memang tidak tercantum memiliki sertifikat kompetensi tersebut.

Kasus Bank Century tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPK dikarenakan pelaksanaan audit investigasi dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiner*). Kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan keterampilan auditor aparat pemeriksa yang menyebabkan kompetensi auditor kurang maksimal yang nantinya juga akan berdampak terhadap kinerja auditor.

Keberhasilan kinerja auditor juga tidak terlepas dari tersedianya teknologi informasi. Auditor akan berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian intern dimana pada saat ini auditee sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda. Perangkat keras maupun lunak terus berkembang secara pesat seiring perkembangan teknologi. Walaupun auditor harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang pesat, tetapi dalam pelaksanaan audit, auditor diharapkan dapat menerapkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan dapat meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang akhirnya akan berdampak pada kinerja auditor.

Berdasarkan uraian diatas, melihat banyaknya kasus yang terjadi berhubungan dengan independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi sehingga nantinya akan berdampak pada kinerja auditor maka penulis mengambil judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, KOMPETENSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA AUDITOR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kinerja auditor di Indonesia terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan auditor sehingga membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap kinerja auditor.
2. Adanya kasus pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dibeli oleh sejumlah uang. Sehingga sikap independensi auditor tampak masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga akan berdampak pada kinerja auditor tersebut.
3. Profesionalisme auditor BPK juga tampak masih lemah, karena auditor telah melanggar komitmen profesi dan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keterangan palsu sehingga akan berpengaruh nantinya terhadap kinerja auditor.
4. Kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan keterampilan auditor aparat pemeriksa yang menyebabkan kompetensi auditor kurang maksimal.

5. Auditor akan berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian intern dimana pada saat ini *auditee* sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini supaya lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu ditetapkan batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kinerja auditor diukur dari independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi.
2. Objek penelitian adalah auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penelitian dibatasi pada kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?
4. Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?

5. Apakah independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
2. Mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
3. Mengetahui apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
4. Mengetahui apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
5. Mengetahui apakah independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis

Sebagai pengetahuan, pengembangan, dan penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

b. Bagi pengembang ilmu akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan umumnya dalam ilmu akuntansi, khususnya mengenai auditing.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting atau bahan evaluasi bagi auditor dalam menerapkan independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja auditor.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat menambah bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menambah referensi kepustakaan Universitas mengenai Audit Sektor Publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Definisi Audit

Auditing menurut (Fitrawansyah, 2014:1) diartikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara kritis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan bersikap independen guna prolehan dan melakukan penilaian berdasarkan kecukupan bukti audit yang ada secara objektif.

(Mulyadi, 2014:9) juga berpendapat secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai.

(Arens, Randal J Elder, & Mark S Beasley, 2014:2) mengatakan auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pemeriksaan dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2016 disebutkan bahwa pemeriksaan atau auditing adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Auditor digolongkan menjadi tiga kategori(Mulyadi, 2014:28), yaitu:

- a. Auditor Independen : Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
- b. Auditor Pemerintah : Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
- c. Auditor Internal : Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisien dan efektivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Pada sektor publik, yang menjadi auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UU ini diatur bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Fitrawansyah, 2014:17).

2.1.2. Kinerja

Menurut (Sitio & Anisykurlillah, 2014), kinerja auditor merupakan hasil dari kerja auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab auditor itu. Kinerja auditor menjadi tolok ukur dari kerja auditor, apakah sudah baik atau belum.

(Safitri, 2015) juga berpendapat bahwa kinerja auditor adalah tingkat pencapaian hasil kerja dan usaha yang dilakukan auditor atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan padanya yang dapat diukur secara kuantitatif, kualitas dan ketepatan waktu. Kinerja seseorang dapat dikatakan baik apabila hasil kerja individu tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Pernyataan itu dipertegas oleh (Ramadhanty, 2013) bahwa kinerja yang baik dapat dicapai saat (1) tujuan yang diinginkan telah tercapai, (2) moderator (kemampuan, komitmen, motivasi) telah tersedia, dan (3) mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, dan strategi) telah dijalankan.

Kinerja auditor profesional mengacu pada prestasi kerja auditor yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja yang tinggi terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja auditor BPK RI secara keseluruhan. (Kurniasari, 2016) dalam mengukur kinerja auditor terdapat empat dimensi personalitas, yaitu:

1. Kemampuan (*ability*)

Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan.

2. Komitmen profesional

Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut.

3. Motivasi

Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

4. Kepuasan kerja.

Kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

2.1.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut (Wibowo, 2016:155) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan

2.1.2.2. Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut (Wibowo, 2016:188) penilaian kinerja atau *performance appraisal* adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu. Tujuan penilaian kinerja menurut (Mangkunegara, 2016:10) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya

- e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, pelatihan khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah.

2.1.3. Independensi

Kode perilaku profesional AICPA dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen: independen dalam berpikir dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagai besar nilai dari fungsi audit telah hilang (Arens et al., 2014:102-103).

(Mulyadi, 2014:26) mengatakan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 (BPK RI, 2017) independensi diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict*

of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*).

Dari beberapa pengertian independensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Institusi dan auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi ketika melakukan audit. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan auditor secara individu dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor tersebut harus menolak penugasan audit (Zamzani, Faiz, & Mukhlis, 2017:19).

Berdasarkan standar umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI, 2017) disebutkan bahwa pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa.

- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa; dan
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Menurut (Mayangsari & Wandanarum, 2013:81) Pernyataan standar umum kedua menyatakan “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

a. Gangguan pribadi

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi.

b. Gangguan ekstern

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa

dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif.

c. Gangguan organisasi

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi dan struktur organisasinya.

Menurut (Seputra, 2013:47), auditor harus independen dalam fakta dan independen dalam penampilan.

a. Independensi dalam fakta: auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias (independen) disepanjang audit

b. Independensi dalam penampilan: pemakaian laoran keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut

Terdapat tiga aspek dalam independensi auditor (Seputra, 2013:47), yakni:

a. Independensi dalam diri auditor (*independence in fact*) kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam audit.

b. Independensi dalam penampilan (*perceived independence*) independensi ini merupakan tinjauan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor.

c. Independensi dipandang dari sudut keahliannya. Keahlian juga merupakan faktor independensi yang harus diperhitungkan selain kedua independensi yang telah disebutkan. Dengan kata lain auditor dapat mempertimbangkan fakta dengan baik yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki keahlian mengenai hal tersebut.

2.1.4. Profesionalisme

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan memenuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Profesionalisme secara luas didefinisikan oleh (Messier, Glover, & Prawitt, 2014:216) merujuk pada perilaku, tujuan atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Seorang yang profesional, mengakui adanya tanggung jawab untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingannya dimana etika profesi merupakan dasar yang melandasi profesionalisme modern. (Akbar, Gunawan, & Utomo, 2015) berpendapat bahwa, profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibebankan kepadanya. Auditor dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan menaati standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI.

Berdasarkan kerangka konseptual pemeriksaan dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI, 2017) profesionalisme diartikan sebagai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap

profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesionalisme (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*).

Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. (Ramadhanty, 2013) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi yaitu:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pernyataan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.
2. Kewajiban sosial (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*believ in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggung jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai etika profesional yang ada agar tercapainya kinerja.

2.1.5. Kompetensi

Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan beberapa pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa.

Menurut (Mulyadi, 2014:58) kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang mereka tidak punyai.

Kompetensi dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI, 2017) diartikan sebagai pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

- a. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan
- d. Keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

2.1.6. Penerapan Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi mendorong terjadinya perubahan revolusioner terhadap perilaku individu dalam bekerja, dan dalam konteks penggunaan PC, kemungkinan seseorang mempunyai keyakinan bahwa penggunaan komputer akan memberikan manfaat bagi dirinya. (Dewi, Oktaroza, & Purnamasari, 2017) menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi

informasi adalah satu dari banyak alat yang digunakan untuk menghadapi perubahan. Proses perencanaan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Dripani & Pratomo, 2014).

Penerapan teknologi informasi oleh auditor akan memberikan kemudahan serta mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan, dengan demikian akan memberikan manfaat dalam peningkatan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dripani & Pratomo, 2014) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor BPK RI perwakilan Jawa Barat.

Penerapan teknologi informasi bagi auditor akan memberikan manfaat bagi dirinya dan pekerjaannya, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dapat diselesaikan lebih cepat dari pekerjaan yang dilakukan secara manual. Keberhasilan dari proses penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan kinerja auditor.

BPK saat ini menerapkan teknologi informasi-audit dalam melaksanakan pemeriksaannya. Dengan diimplementasikan e-audit, BPK RI diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan mendukung terwujudnya tata kelola yang baik atas pelaksanaan tugas utama BPK RI (Dripani & Pratomo, 2014).

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kinerja auditor yang dapat dijadikan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Adelia Lukyta Arumsari & I Ketut Budiarta (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor, independensi auditor, etika profesi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, independensi auditor, etika profesi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh positif pada kinerja auditor.

2. Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha & I wayan Ramantha (2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pelatihan auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 65 kuesioner. Namun, yang kembali dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 63 kuesioner. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS

15.00 *for windows*. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel profesionalisme, etika profesi dan pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

3. **Devi Safitri (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan mengambil responden sebanyak 90 auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Batam dan Medan. Analisis data dilakukan melalui analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, 2) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi, 3) Independensi Auditor tidak berpengaruh dantidak signifikan terhadap kinerja auditor, 4) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, 5) Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, 6) Komitmen mampu dijadikan variabel intervening untuk pengaruh variabel independensi terhadap kinerja auditor, 7) Komitmen tidak mampu dijadikan variabel intervening untuk pengaruh variabel independensi terhadap kinerja auditor.

4. Muknisa Elda Dripani dan Dudi Pratomo, (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Populasi penelitian ini adalah auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Data yang diolah adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Data kemudian dianalisis menggunakan garis kontinum untuk mendeskripsikan data, setelah itu dilakukan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Secara parsial, independensi auditor dan pemahaman *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, karena jika dilihat dari distribusi jawaban responden sebesar 20% tidak menyetujui pernyataan yang dipaparkan, sedangkan penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

5. Rizky Pasca Baisary, (2013)

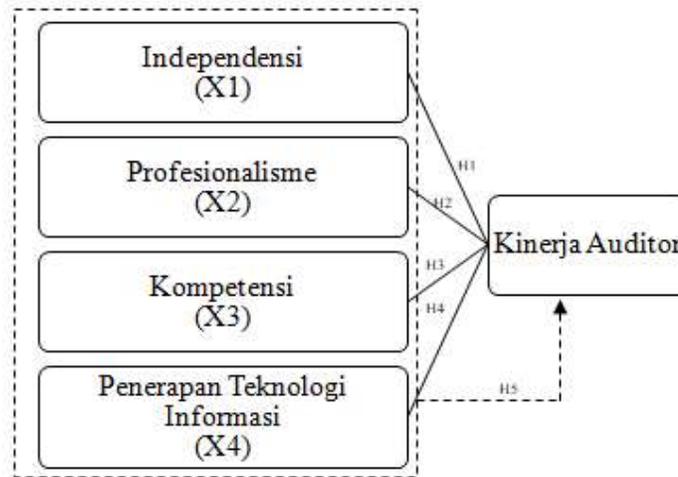
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan komitmen terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan menggunakan sarana kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Regresi linier berganda telah digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan komitmen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini ditunjukkan oleh nilai adjusted R square 0,851 yang berarti bahwa kinerja auditor 85,1% telah dipengaruhi oleh integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan komitmen. Berdasarkan hasil tes parsial, kompetensi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 28%.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014:128).

Berdasarkan teori yang diperoleh dan dijelaskan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel yang dipengaruhi (*dependent*) adalah kinerja auditor (Y).
2. Variabel yang mempengaruhi (*independent*) adalah independensi (X1), profesionalisme (X2), kompetensi (X3) dan penerapan teknologi informasi (X4).

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2014:134).

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya, dan berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H2 : Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H3 : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H4 : Penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H5 : Independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian salah satu hal yang penting ialah membuat desain penelitian. Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas (Tungga, Saputra, & Vijaya, 2014:39).

Menurut (Indrawati, 2015:113) desain penelitian adalah rencana cetak biru (*blue print*) yang akan dilakukan peneliti terkait perumusan masalah, pengumpulan, pengukuran, pengolahan, dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga tujuan penelitian tercapai.

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Tungga et al., 2014:11). Jika ditinjau berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal (*causal research*) dimana penelitian kausal ini bertujuan untuk memahami variabel mana yang menjadi penyebab (*cause*) dan

variabel mana yang menjadi akibat (*effect*) dan juga untuk melihat sifat hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat, apakah positif atau negatif. Jadi Penelitian ini bermaksud untuk menguji hipotesis apakah mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel independen yaitu independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi terhadap kinerja auditor sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan karena dalam penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner berupa pertanyaan tertulis yang diberikan kepada para responden.

3.2. Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Tungga et al., 2014:29).

Menurut (Indrawati, 2015:124) variabel adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan nilai tersebut dapat berbeda-beda dan dapat berubah. Variabel merupakan suatu gambaran keadaan objek penelitian secara abstrak. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian perlu dijabarkan sehingga variabel yang abstrak tersebut menjadi suatu yang dapat diukur atau *measurable* dalam suatu proses yang biasa disebut operasionalisasi variabel. Operasional variabel adalah suatu proses menurunkan variabel-variabel yang terkandung di dalam masalah

penelitian menjadi bagian-bagian terkecil sehingga dapat diketahui klasifikasi ukurannya, sehingga mempermudah mendapatkan data yang diperlukan bagi penilaian masalah penelitian.

Operasional variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan penjelasan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen dalam bentuk positif maupun negatif. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau anteseden. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Tungga et al., 2014:25).

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menarik perhatian peneliti. Variabel ini sering juga disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen atau indogen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97).

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Independensi (Mayangsari & Wandanarum, 2013:81), (Seputra, 2013:47)	Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun.	<ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan pribadi dan organisasi b. Gangguan ekstern c. Independensi dalam diri auditor d. Independensi dalam penampilan
2	Profesionalisme (Ramadhanty, 2013)	Profesionalisme diartikan sebagai kemampuan, keahlian dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (<i>due care</i>), ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian pada profesi b. Kewajiban sosial c. Kemandirian d. Keyakinan terhadap peraturan profesi e. Hubungan dengan sesama profesi
3	Kompetensi (BPK RI, 2017)	Kompetensi diartikan sebagai pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan standar akuntansi dan auditing b. Wawasan tentang pemerintahan c. Peningkatan keahlian

Tabel 3.2 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
4	Penerapan Teknologi Informasi (Dripani & Pratomo, 2014)	Penerapan teknologi informasi adalah mempraktekkan suatu perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan teknologi informasi dan software audit b. Senang menggunakan teknologi informasi audit c. Teknologi informasi menambah pengalaman d. Meningkatkan kualitas output auditor e. Mempermudah dan mempercepat f. Pembaharuan program g. Kinerja efektif dan efisien h. Pemahaman teknologi informasi <i>auditee</i>
5	Kinerja auditor (Kurniasari, 2016)	Kinerja auditor adalah tingkat pencapaian hasil kerja dan usaha yang dilakukan auditor atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya yang dapat diukur secara kuantitatif, kualitas dan ketepatan waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan b. Komitmen profesional c. Motivasi d. Kepuasan kerja

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut (Indrawati, 2015:164) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, benda-benda yang menarik peneliti untuk ditelaah. Populasi yang

dipilih peneliti untuk ditelaah akan menjadi pembatas dari hasil penelitian yang diperoleh. Artinya penelitian ini hanya akan berlaku pada populasi yang dipilih.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi dari seluruh jumlah auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yaitu berjumlah 35 auditor.

3.3.2. Sampel

Menurut (Indrawati, 2015:164) sampel adalah anggota-anggota populasi yang terpilih untuk dilibatkan dalam penelitian, baik untuk diamati, diberi perlakuan, maupun dimintai pendapat tentang yang sedang diteliti.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga bisa diartikan sampel yang sudah maksimum, ditambah berapapun tidak akan merubah keterwakilan (Sugiyono, 2014:156).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data adalah sumber data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Tungga et al., 2014:67). Data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden.

Kuesioner merupakan instrumen untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden (Sugiyono, 2014:230). Kuesioner didesain dari dua bagian. Bagian pertama berisi deskripsi responden yaitu data demografi responden. Bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi, profesionalisme, kompetensi, penerapan teknologi informasi dan kinerja auditor. Masing-masing kuesioner disertai surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditunjukkan kepada responden. Surat permohonan tersebut berisi identitas peneliti, maksud penelitian dan jaminan kerahasiaan data penelitian.

Kuesioner disebarkan secara langsung kepada auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan selanjutnya data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:168). Peneliti menggunakan skala *likert* 5 titik yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Skala *Likert*

Bobot	1	2	3	4	5
Kategori	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:238). Analisis deskriptif digunakan untuk menyusun tabel frekuensi distribusi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Data-data yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang disebarkan akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel ini akan memberikan informasi mengenai ciri-ciri responden dan gambaran mengenai deskriptif variabel independen yaitu independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi serta variabel dependen yaitu kinerja auditor.

3.5.2. Uji Kualitas Data

Instrumen uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel. Hal ini masih akan

dipengaruhi oleh kondisi obyek yang diteliti, dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014:203).

3.5.2.1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi validitas suatu alat pengukur, maka alat pengukur tersebut semakin mengena sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur (Indrawati, 2015:146).

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor totalnya. Jumlah nilai dari keseluruhan item merupakan skor total dari item tersebut. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh *Pearson*, yang dikenal dengan rumus korelasi *Product Moment* (Sugiyono, 2017:228) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Rumus 3.1 Korelasi *Product Moment*

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*

n = Jumlah sampel

x_i^2 = Kuadrat masing-masing skor/nilai variabel X

y_i^2 = Kuadrat masing-masing skor/nilai variabel Y

$x_i y_i$ = Hasil kali masing-masing skor/nilai variabel X dan Y

$\sum x_i$ = Jumlah skor/nilai variabel X

$\sum y_i$ = Jumlah skor/nilai variabel Y

$(\sum x_i^2)$ = Jumlah kuadrat skor/nilai variabel X

Menurut (Wibowo, 2012:37) dalam SPSS, nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikan 0,05. Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika:

1. r hitung $>$ r tabel (uji dua sisi dengan sig 0,05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.
2. r hitung $<$ r tabel (uji dua sisi dengan sig 0,05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel sebagai berikut (Sugiyono, 2017:231):

Tabel 3.4 Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya (reliabel) akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Jika datanya benar dan dapat dipercaya, maka meskipun pengambilan data dilakukan berulang kali hasilnya tetap akan sama. Dengan demikian instrumen yang reliabel dapat diandalkan sebagai instrumen penelitian (Hartono, 2015:126).

Penelitian ini menggunakan rumus *alfa cronbach* untuk melakukan pengujian reliabilitas dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right)$$

Rumus 3.2 Alfa Cronbach

Keterangan:

r_{11} = Nilai reliabilitas

$\sum S_i$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

S_t = Varians total

k = Jumlah item

Menurut (Noor, 2013:165), terdapat hal-hal pokok yang terdapat pada uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan.
2. Uji reabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan.
3. Jika nilai alpha > 0,06 maka disebut data tersebut reliabel.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik (Siregar, 2017:153).

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan yaitu histogram, normal P-P Plot dan Uji *Kolmogorov-smirnov*.

Menurut (Ghozali, 2011:163) pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat nilai pada metode *kolmogorov-smirnov*. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika:

1. Nilai *kolmogorov-smirnov* $Z < Z$ tabel
2. Nilai *probability sig (2 tailed)* $> \alpha$; $\text{sig} > 0,05$

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016:103) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien di uji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Dalam penelitian ini untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi maka digunakan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Menurut (Ghozali, 2011:106) *tolenrance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016:134) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila tingkat signifikansi berada diatas 0,05, maka model regresi tidak terdapat heterokedastisitas. Jika varian berbeda, disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda penulis menggunakan metode *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SPRESID (nilai residualnya).

Menurut (Ghozali, 2011:139) ada 2 dasar analisis grafik *plot* atau *scatterplot*, yaitu:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Sarwono, 2013: 10) analisis linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel tergantung dengan skala pengukuran yang bersifat metrik baik untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya. Analisis linier berganda dinyatakan dalam rumusan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Rumus 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Y = Kinerja Auditor

a = Konstanta persamaan regresi

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X1 = Independensi

X2 = Profesionalisme

X3 = Kompetensi

X4 = Penerapan Teknologi Informasi

e = *Error/epsilon* (faktor lain yang mempengaruhi)

3.5.5. Uji Hipotesis

3.5.5.1. Uji t

Menurut (Widarjono, 2015:281) uji statistik distribusi t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Adapun nilai t hitung menurut (Sumanto, 2014:70) sebagai berikut:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\left(\frac{SS_1 + SS_2}{n_1 + n_2 - 2}\right) \left(\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}\right)}}$$

Rumus 3.4 Uji T

Hipotesis dalam uraian kalimat:

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Menurut (Widarjono, 2015:282) membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya. Keputusan menolak atau gagal menolak Ho sebagai berikut:

a. Jika nilai t hitung (absolut) > nilai t kritis maka Ho ditolak atau menerima Ha

- b. Jika nilai t hitung (absolut) < nilai t kritis maka Ho gagal ditolak atau menolak
Ha

3.5.5.2. Uji F

Uji F adalah uji pengaruh semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk uji signifikansi model. Uji F dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Rumus 3.5 Uji F

Hipotesis dari uji ini adalah:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Hipotesis nol mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2015:278).

Dalam penelitian ini taraf signifikansi (α) adalah 0,05 dengan kaidah pengujian sebagai berikut:

Jika nilai F hitung < F tabel dan sig > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika nilai F hitung > F tabel dan sig < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima

3.5.5.3. Uji Determinasi

Menurut (Wibowo, 2012:135) koefisien determinasi digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh

variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Adapun rumus untuk mencari koefisien determinasi secara umum menurut (Quadratullah, 2014:422) adalah sebagai berikut:

$$r^2 = b_1^2 \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$$

**Rumus 3.6 Koefisien
Determinasi**

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. Engku Putri, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan memfokuskan pada auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018. Metode riset yang digunakan adalah metode *survey* untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah dan melakukan perlakuan dalam pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuesioner kepada para auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

